

Lurah Sebagai Pejuang Pancasila*

Oleh: Prof.Dr.Sudjito.SH.MSi **

Pendahuluan

Rasa syukur ke hadirat Allah SWT dan ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi, yang telah mempercayai saya untuk berbagi ilmu dan pemikiran dengan Lurah-lurah yang hadir dan berbahagia pada kesempatan ini. Sungguh saya sangat bergembira, bahwa pertemuan ini ingin membahas materi yang sangat strategis dalam rangka membangun bangsa, yakni imlementasi Pancasila. Hemat saya, pembahasan atas materi ini penting, dan di situlah Lurah-lurah dapat berperan, sesuai tugas dan wewenangnya.

Pertama, berdasarkan kajian ilmiah, agar negara Indonesia yang telah merdeka sejak 17 Agustus 1945 ini segera dapat mewujudkan cita-citanya, maka dalam berbagai kegiatan, Lurah-lurah perlu memperoleh prioritas untuk tampil sebagai pejuang, ujung tombak terdepan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Bila kita tengok sejarah perjuangan bangsa, sejak dahulu Lurah-lurah senantiasa berjuang bersama rakyat dalam semangat perjuangannya membara dan berkobar-kobar. Di era reformasi inipun, semangat perjuangan itu perlu terus dikobarkan. Jangan sampai ada Lurah yang *mlempem, leda-lede*, bermalas-malasan. Lebih-lebih Lurah-lurah yang masih tergolong muda. Kata Bung Karno: “Kalau pemuda sudah berumur 21, 22, sama sekali tidak berjuang, tak bercita-cita, tak giat untuk tanah air dan bangsa...Pemuda yang begini baiknya digunduli saja kepalanya...”. Bung Karno juga pernah bilang: “Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”. Pernyataan itu secara tersirat memberikan dorongan, semangat dan motivasi bahwa bila kita berkeinginan memperbaiki kehidupan masyarakat dan negara dengan cepat, maka perlu ada sinergitas dan kebersatuan antar generasi, antar semua komponen. Hemat saya, pesan moral Bung Karno itu masih cukup relevan untuk diaktualisasikan oleh Lurah-lurah di era reformasi ini.

Kedua, sangat diharapkan Lurah-lurah menghayati, mengenal jati-dirinya, maupun wilayahnya (baik potensi maupun masalahnya), sehingga pada muaranya mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila atas dasar kesadaran, keikhlasan dan kesungguhan kepada warganya, sehingga kehidupan di wilayahnya diwarnai sikap toleran, harmonis, dalam semangat juang tinggi. Lurah-lurah mesti tampil sebagai pejuang Pancasila. Kita sadar bahwa perjuangan sekarang ini jauh lebih berat dibandingkan perjuangan generasi '45 dulu, sebab musuh yang

* Disampaikan pada Diklat Lurah-lurah di Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi, di Cisarua, Bogor, 11 Mei 2015. Sebagian materi makalah ini diracik ulang dari makalah penulis sebelumnya.

** Guru Besar Ilmu Hukum dan Tim Ahli Pusat Studi Pancasila UGM,.

dihadapi bukan lagi penjajah, tetapi melawan bangsa asing sekaligus bangsa sendiri. Siapa mereka itu? Tidak lain, mereka yang sengaja mengkhianati Pancasila, serta merta berusaha menggantikannya dengan faham, isme atau ideologi lain yang berseberangan. Musuh kita saat ini, antara lain: para koruptor, orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, mereka yang terlibat dalam kejahatan narkoba, serta calon-calon legislator dan pemilih yang terlibat dalam *money politic* pada pemilihan umum. Mereka telah berkhianat terhadap Pancasila, dan oleh karenanya mereka adalah musuh-musuh kita bersama. Lurah-lurah wajib percaya diri dan mampu menjaga jati-diri, terus berjuang bersama rakyat memerangi dan meminimalisir berbagai bentuk kejahatan-kejahatan tersebut.

Implementasi Pancasila

Hemat saya, seorang Lurah layak disebut sebagai pejuang Pancasila, ketika telah mampu mengimplementasikan Pancasila pada dua ranah berikut:

Pertama, pada ranah normatif, mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara utuh dan menyeluruh atas dasar wawasan kebangsaan. Perlu diingat bahwa secara normatif, Kelurahan adalah bagian wilayah administratif di bawah Kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Berdasarkan Permendagri No.31 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan, dan Permendagri No.28 tahun 2006 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, maka syarat-syarat pembentukan kelurahan adalah sebagai berikut: (1) Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK, dengan luas paling sedikit 3 km; (2) Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK, dengan luas paling sedikit 5 km; dan (3) Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 900 jiwa atau 180 KK, dengan luas paling sedikit 7 km².

Dipersyaratkan pula, bahwa setiap kelurahan harus memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai. Kelurahan yang tidak lagi memenuhi kondisi di atas dapat dihapuskan atau digabungkan dengan kelurahan yang lain, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemekaran kelurahan dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan tersebut.

Adapun tugas pokok kelurahan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta urusan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

Dalam pada itu, fungsi kelurahan, meliputi: (1) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (2) Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum; (3) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; (4) Membina lembaga kemasyarakatan; (5) Membina dan mengendalikan administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga; (6) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang-lingkup tugasnya; (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara spesifik, Lurah diberikan tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Lebih detail, tugas pokok tersebut dijabarkan menjadi berbabagi tugas, meliputi: (1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; (2) Pemberdayaan masyarakat; (3) Pelayanan masyarakat; (4) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; (5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan (6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan.

Kedua, pada ranah sosiologis, telah berusaha sungguh-sungguh mewujudkan kehidupan yang adil-makmur bagi seluruh warganya. Diawali dengan mengubah perilaku aparat/pamong beserta warganya, menjadi manusia-manusia yang menunjung tinggi nilai kejujuran, sekaligus meningkatkan rasa syukur atas segala kenikmatan kehidupan sebagai karunia Tuhan YME. Ini semua bukan pekerjaan mudah dan sederhana, melainkan pekerjaan berat dan kompleks. Tidak lain, karena perilaku kufur dan korup telah mewabah, merambah berbagai kalangan - penyelenggara negara maupun warga negara - di pusat maupun daerah. Tanpa menyebut contoh kasus, kiranya Lurah-lurah sangat mudah menemukan berbagai bentuk kejahatan-kejahatan dan perilaku nista itu.

Perlu diketahui bahwa kini telah ada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai wujud implementasi UU ini, Pemerintah akan memberikan dana Rp.1,4 miliar kepada desa. Agar pengelolaan dana ini tidak bermasalah, akan diselenggarakan pelatihan-pelatihan mulai 2015. Pelatihan diselenggarakan oleh tim, yang akan membantu kemampuan SDM di desa, termasuk menguatkan pendampingan desa pada kelembagaan dan aparatur desa. Dalam pelatihan diajarkan pula menyusun anggaran yang betul dan benar sesuai kebutuhan desa, serta pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tim Pendamping nantinya akan diawasi oleh audit dari BPK. Kalau ada penyimpangan dipastikan akan diberi sanksi hukum.

Sebagai pejuang Pancasila, mestinya implementasi program revolusi mental yang dicanangkan Pemerintah, mestinya diawali dari perubahan sikap-mental pada Lurah-lurahnya. Sekadar diketahui bahwa dalam rangka mengubah sikap mental bangsa, Pemerintah sudah menyediakan dana Rp 149 miliar untuk anggaran revolusi mental. Dana sebesar itu, akan digunakan untuk kampanye ubah perilaku, misal melalui iklan, film, dialog publik, menyuruh tokoh-tokoh agama bicara perubahan perilaku. Dana diberikan kepada Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, dan pelaksanaannya akan dibagikan kepada kementerian-kementerian terkait (Vivanews, 25/2/2015). Mudah-mudahan implementasinya sampai di Kelurahan-kelurahan.

Izinkan saya mengulangi pernyataan dalam artikel Opini di Harian *KORAN SINDO* beberapa waktu yang lalu, bahwa: Sekadar urun-rembug, revolusi mental sebenarnya dapat disederhanakan sebagai program perubahan perilaku bangsa agar senantiasa mengedepankan perilaku syukur atas dua hal, yaitu : (1) rahmat Tuhan berupa kemerdekaan, dan; (2) penguasaan tanah, air, serta sumberdaya alam melimpah. Syukur, disini dalam maknanya "menggunakan atau mengolah nikmat yang dilimpahkan Tuhan sesuai dengan tujuan dianugerahkannya".

Sebagai bangsa, kita yakin dengan daya kreasi atau inisiasi yang melekat pada jiwa setiap warga negara, bahwa kemerdekaan dapat dijadikan peluang untuk membangun negara. Sumber daya alam melimpah, laksana jamrut khatulistiwa, bila digunakan dan diolah bangsa sendiri secara bijak, pastilah mendatangkan kesejahteraan berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cinta tanah air dan berdaulat atas negeri sendiri, merupakan manifestasi perilaku syukur dan keberhasilan revolusi mental.

Boleh jadi, kita galau, resah, gelisah, melihat realitas bahwa neokolonialisasi negara atau perusahaan asing atas negeri ini semakin membelenggu. Utang luar negeri terus bertumpuk. Data terbaru Bank Indonesia yang dirilis 19 Februari 2015 per kuartal keempat tahun 2014 sebesar Rp 3.759 triliun. Sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, listrik, gas, dan air bersih menjadi penyumbang utang terbesar swasta (Tempo.co, 19/2/15). Dalam hal penguasaan sumber daya alam, Freeport menguasai emas, tembaga dan hasil tambang lainnya di bumi Cenderawasih, sementara Pemerintah hanya memperoleh 10% dari seluruh hasilnya. Hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua dibagi-bagi melalui Hak Pengelolaan Hutan kepada para petinggi dan dikerjasamakan dengan perusahaan asing. Negara hanya memperoleh bagian sekitar 20% dari iuran hasil hutan dan pajak. Dari tambang batubara dan hasil tambang lainnya negara hanya memperoleh sekitar 30%, sementara 70% lainnya menjadi hak pemegang konsesi. Data kasar tersebut cukup memberi gambaran bahwa kita belum berdaulat atas negeri sendiri.

Dalam perspektif teologi hukum, gelisah atas nasib negeri merupakan bagian dari siksa Tuhan di dunia. Mengapa bangsa ini disiksa? Tentu karena pelanggaran terhadap norma-norma yang ditetapkanNya. Nafsu menumpuk harta, ingin cepat kaya, ingin langgeng berkuasa, adalah contoh-contoh perilaku nista yang dibenci Tuhan dan makhlukNya. Apalagi, seiring bergolaknya nafsu duniawi, hukum direkayasa melalui aktivitas politik dan bisnis, agar perilakunya seolah-olah legal, padahal yang demikian itu amoral.

Di dalam Pancasila, nilai-nilai keadaban dan keadilan menjadi dasar dan sumber membentuk perilaku syukur. Pada jiwa manusia beradab, tertanam budi luhur, dan melalui pendayagunaan cipta, rasa dan karsanya, dihasilkan kebudayaan. Perilaku korup, jelas bukan budaya, bukan lahir dari keluhuran budi, melainkan mentalitas sesat dan rakus terhadap uang negara. DPR, Kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional ditengarai merupakan lembaga-lembaga terkorup. Mulai saat ini dan ke depan, setiap Kelurahan hendaknya dibentengi dengan nilai-nilai moral Pancasila dan profesionalitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan, agar "penyakit" korupsi tidak menjalar ke wilayah kelurahan.

Penutup

Perjuangan Lurah-lurah menanamkan nilai-nilai Pancasila, dapat diamati keberhasilannya ketika setiap warga dan perangkat kelurahan dapat tidur nyenyak, makan enak-bergizi, cukup sandang, dapat berteduh di bawah atap yang dinaungi kesejukan, dalam rahmat Allah SWT, sebagai keluarga-keluarga sakinah. Dari hamparan laut luas, setiap warga dapat makan ikan segar dengan harga murah, memakai perhiasan nan indah, tongkat kayu yang jatuh pun jadi tanaman, dapat berlayar dengan aman dan nyaman, serta menikmati indahnya mata hari terbit maupun tenggelam. *Wallahu'alam.*